

**KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DI INDONESIA**

**(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai  
Tahun 2020)**

**SEMINAR HASIL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam  
Sumatera Utara*

Oleh :

**AHMAD ALHADI  
NPM : 71190123071**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DI INDONESIA**

**(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai  
Tahun 2020)**

**SEMINAR HASIL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam  
Sumatera Utara*

Oleh :

**AHMAD ALHADI  
NPM : 71190123071**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**

Medan,      Oktober 2021

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Marzuki, SH., M.Hum)

(Dr. Ibnu Affan, SH.M.Hum)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “**Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020)**”. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Bapak Dr.Mukidi, SH., HM. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
5. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
6. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Tuhan YME memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua..

Medan, Juni 2021

Penulis

**Ahmad Alhadi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>ABSTRACT.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual .....	25
G. Metode Penelitian .....	27
1. Sifat dan Jenis Penelitian .....	27
2. Sumber Data .....	28
3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data .....	31
 <b>BAB II : PENGATURAN HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....</b>	 33
A. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	33
B. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah .....	46
C. Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis .....	64

<b>BAB III : PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DIKAJI DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....</b>	<b>70</b>
A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah .....	70
B. Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid-19 .....	76
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	85
<b>BAB IV : HAMBATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN SOLUSI MENGATASINYA .....</b>	<b>97</b>
A. Hambatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai di Tengah Pandemi Covid-19 .....	97
B. Upaya Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pilkada Serentak Dimasa Pandemik Covid-19 .....	108
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Rozali *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Affan, Ibnu, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018.
- Aggusalim, Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Gahlia Indonesia, Bogor, 2017.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- ; *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- ; *Perekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- ; *Demokrasi dan Nomokrasi : Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015.
- ; *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Otonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an)*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2014.
- ; *Konsolidasi Naskah UUD'45 Setelah Perubahan Keempat*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2016.

- Aziz, M. Noor, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Hukum Nasional Kementerian HAM RI, Jakarta, 2020.
- Buchori, Muchtar, *Indonesia Mencari Demokrasi*, INSISTPress, Yogyakarta, 2015.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- , *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
- Djojosoekarto, Agung dan Rudi Hauter, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Adeksi, Jakarta, 2013.
- Fadjar, A. Mukhtie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.
- Fauzi, Irham, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- Gaffar, Jenedry M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah Kajian Politiik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- ; *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Elsam, Jakarta, 2017.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Huda, Ni'matul, dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Iver. Mc, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Lana Blasyim, Aksara Baru, Jakarta, 2013.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2014.

Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global Edisi Revisi*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2017.

-----; *Kepemimpinan KepalaDaerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, SinarGrafika. Jakarta, 2011.

Kartasapoetra, R.G. *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2011.

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta, 2015.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi)*, UII Press, Yogyakarta, 2016.

Mahfud MD, Mohd, *Dasar dan Stmktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2011.

-----; *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 2017.

Manan, Bagir, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006.

-----; *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH-UNILA. Bandar Lampung 2016

Mangunsong, Nurainun, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2012.

Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Prayudi, et al., *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Penerbitan DPR RI, Jakarta, 2017.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat (Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain)*. Nusamedia, Bandung, 2017.
- Sarundjang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- S, Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sorensen, G. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Susanti, Bivitri, *Hakim atau Legislator*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Suseno, Frans Magnin, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Model Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2011.

Stefanus, Kotan Y. *Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945)*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

Tjenreng, Zubakhrum, *Pilkada Serentak Penguanan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Kemang, Depok, 2016.

Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal*, In-Trans Publishing, Malang, 2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Wijayanti, Septi Nur dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016.

## B. Internet

Topan Yuniarto, “Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia”, Kompaspedia, 7 Desember 2020, <https://kompaspedia.kompas.id>, diakses 2 Agustus 2021.

## C. Jurnal

Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Skripsi Juanda Tampubolon), *Esensi Pemaknaan kata “Demokratis” dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945 (Studi Konstitusional Terhadap Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 2 Tahun 2017.

Artz, Marjanne Termorshutzen, *The Concept of Rule of Law*, *Jurnal Jentera Edisi 3*, Tahun II November 2018, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2018.

Aziz, M. Noor, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahun 2011.

Budhiati, Ida “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013.

- Haris, Syamsuddin, "Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 4, Nomor 1, April 2015.
- Hergianasari, Putri, "Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 01, Nomor 1, Agustus 2020.
- Indrayana, Denny, *Komisi Negara: Evaluasi Kekinian Tantangan Masa Depan*, Jurnal Yustisia, Edisi XVI Nomor 2, Juli –Desember, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012.
- Melfa, W. "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013.
- Nasution, Hilmi Ardianto, *Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontensi Pemilihan Umum*, Jurnal HAM, Volume 10,Nomor 2, Desember 2019.
- Nugroho, Setyo, "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan," *Jurnal Cita Hukum*,Vol. 1, No. 2 Tahun 2018.
- Pramusinto, Agus, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jurnal Analisis CSIS Volume 33, Nomor 2, Juni 2014.
- Ridho, Mohamad Faisal, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia" *Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 8 Tahun 2017.
- Nasution, Latipah, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 9, 2017
- Nugraha, Harry S, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No. 1), 2018.
- Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- Sinaga, Parbuntian, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.
- Sodikin, "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2014.

Sugiharto, Imawan, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 3 Tahun 2016.

Supriyadi, "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Desember 2020.

Umar, Hasbi, "*Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD* ,*Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2018.

Utomo, Wahyu Wiji *Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal)*, Jurnal Al-Harakah, Volume 03, Nomor 1, 2020.

Wasisto, Aryo dan Prayudi, *Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XII, Nomor 12, Tahun 2020.

Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 2, No. 2, November 2015.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelanggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.